

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang

Dasar Hukum Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan DR. Suratmo Nomor 28 Kelurahan Kembangarum Semarang 50183.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberi dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berfungsi sebagai panduan strategis pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Fokus utama RPJMN ini mencakup

percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, sektor kelautan dan ruang laut memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis BPPMHKP Tahun 2025-2029 merupakan landasan utama bagi upaya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, hilirisasi, serta peningkatan daya saing sektor perikanan di Indonesia. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja BPPMHKP. Dalam pelaksanaannya, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, guna memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan utama dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah mencari rendahnya kepatuhan, standar pengujian, kurangnya sarana pengujian mutu dan efisiensi tata kelola yang harus diperkuat. Oleh karena itu, peningkatan mutu hasil perikanan melalui pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat serta hilirisasi hasil perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Keberhasilan rencana strategis ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan kualitas produk perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungannya. Oleh karena itu, melalui kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada periode 2025-2029 dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat. Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh BPPMHKP. Sasaran BPPMHKP dijabarkan sebagai berikut: Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP menetapkan sasaran spesifik dan terukur dalam empat (4) sasaran program utama:

1. Program Manajemen Mutu
2. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer
3. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pascapanen
4. Program Dukungan Manajemen

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan Semarang. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 11 (sebelas) kali. Hal ini disebabkan adanya revisi ke-7 tanggal 8 Oktober 2025 terdapat perubahan pagu dari Rp. 7.098.970.000,- menjadi Rp. 8.147.953.000,- perubahan terkait karena adanya penambahan pagu belanja pegawai. Revisi ke-9 tanggal 18 November 2025 terdapat perubahan pagu dari Rp. 8.147.953.000,- menjadi Rp. 7.350.345.000 karena adanya perubahan terkait buka blokir anggaran.

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.840.098.000	1.840.098.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	1.840.098.000	1.840.098.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.785.436.000	4.834.419.000
Belanja Barang	3.313.534.000	2.515.926.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	7.098.970.000	7.350.345.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp1.002.200
9.000,-*

Realisasi Pendapatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang untuk 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.002.2009.000,- atau mencapai 54,45 persen dari estimasi anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.840.098.000,- dengan rincian penerimaan dalam negeri yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri dari Pendapatan Jasa yang berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Rp.1.002.209.000,- pendapatan jasa lainnya yang merupakan penerimaan kembali

belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp0- , penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp.0,- dan pendapatan penjualan peralatan dan mesin Rp.0,-

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Karantina	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Pengujian	1.840.098.000	1.002.209.000	54,45
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	-	-
Pendapatan peralatan dan mesin		-	
Jumlah	1.840.098.000	1.002.209.000	54,45

Realisasi Pendapatan Jasa Karantina dan pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 50,16 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan pnpb pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REAL 31 Des 2025	REAL 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina		280.000	-100,00
Pendapatan Pengujian	1.002.209.000	2.005.895.000	-50,04
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda penyelesaian pekerjaan	-	-	#DIV/0!
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	-	657.813	-100,00
Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	-	3.973.000	-100,00
Jumlah	1.002.209.000	2.010.805.813	-50,16

B.2 Belanja

Realisasi Realisasi Belanja Negara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
Belanja Negara Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang 31 Desember 2025
Rp7.096.141.1 adalah sebesar Rp7.096.208.935,- atau 96,54 persen dari anggaran
43,- belanja sebesar Rp7.350.412.792,-. Rincian anggaran dan realisasi
 belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

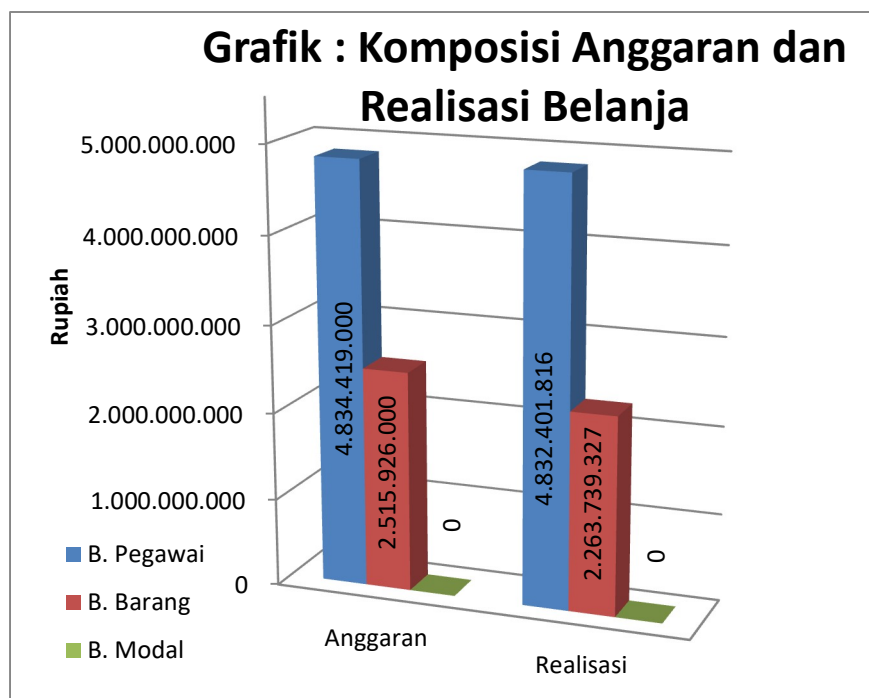
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.834.419.000	4.832.401.816	99,96
Belanja Barang	2.515.926.000	2.263.739.327	89,98
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	7.350.345.000	7.096.141.143	96,54
Pengembalian		67.792	-
Jumlah	7.350.345.000	7.096.208.935	96,54

Realisasi bruto per 31 Desember 2025 sebesar Rp.7.096.141.143,- terdapat pengembalian sebesar Rp.67.792,- sehingga realisasi netto sebesar Rp.7.096.208.935,-. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran 31 Desember 2024 terdapat penurunan sebesar 4,14% dikarenakan pada tahun 2025 pagu anggaran mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2024.

Realisasi Belanja Negara jika pagu dikurangi blokir anggaran senilai Rp. 249.680.000,- maka realisasi belanja anggaran pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.096.141.143,- atau mencapai 99,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.100.665.000,-.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 4,14% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

- Realisasi mengalami penurunan sebesar 4,14% disebabkan antara lain turunnya pagu anggaran tahun 2025 jika dibandingkan pagu anggaran tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.832.401.816	3.777.699.027	27,92
Belanja Barang	2.263.739.327	3.625.152.366	(37,55)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7.096.141.143	7.402.851.393	(4,14)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai Rp
4.644.147.835,-

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.644.147.835,- dan Rp 3.777.699.027-. Dengan Jumlah pegawai pada Balai KIPM Semarang sebanyak 34 Pegawai per 31 Desember 2025. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 22,94 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Blnj. Gaji Pokok PNS	1.642.328.760	1.388.710.400	18,26
Blnj. Pembulatan Gaji PNS	23.257	20.261	14,79
Blnj. Tunj. Suami/Istri PNS	109.985.864	88.281.960	24,58
Blnj. Tunj. Anak PNS	36.703.590	31.662.412	15,92
Blnj. Tunj. Struktural PNS	13.500.000	17.280.000	(21,88)
Blnj. Tunj. Fungsional PNS	101.820.000	124.010.000	(17,89)
Blnj. Tunj. PPh PNS	13.503.877	10.425.461	29,53
Blnj. Tunj. Beras PNS	86.252.220	74.520.180	15,74
Blnj. Uang Makan PNS	257.785.000	182.130.000	41,54
Blnj. Tunj. Umum PNS	45.720.000	16.625.000	175,01
Blnj. Uang Lembur	68.791.000	36.338.000	89,31
Blnj. Tunj. Khusus / Kegiatan PNS	2.267.802.059	1.807.695.869	25,45
Realisasi Belanja Bruto	4.644.215.627	3.777.699.543	22,94
Pengembalian Belanja	(67.792)	(516)	-
Realisasi Belanja Netto	4.644.147.835	3.777.699.027	22,94

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, realisasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 22,94% dikarenakan adanya dampak mutasi pegawai masuk sebanyak 6 pegawai ke BKIPM Semarang dan diangkatnya PPNP ke PPPK 8 pegawai di bulan Oktober 2025 yang dibebankan ke belanja pegawai.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Rp2.263.739.327,- adalah masing-masing sebesar Rp2.263.739.327,- dan
327,- Rp3.625.152.366,-. Realisasi belanja barang 31 Desember 2024
mengalami penurunan sebesar 37,55% dari realisasi belanja barang
31 Desember 2024.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	662.786.603	888.056.936	(25,37)
Belanja Barang Non Operasional	103.466.147	239.648.188	(56,83)
Belanja Jasa	927.693.506	1.230.070.487	(24,58)
Belanja Pemeliharaan	432.764.108	618.737.566	(30,06)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	68.661.238	603.030.292	(88,61)
Belanja Barang untuk persediaan.	68.621.618	51.132.843	34,20
Jumlah Belanja Kotor	2.263.993.220	3.630.676.312	(37,64)
Pengembalian Belanja		(5.523.946)	
Jumlah Belanja	2.263.993.220	3.625.152.366	(37,55)

Belanja barang mengalami penurunan sebesar 37,55% disebabkan menurunnya realisasi belanja barang operasional sebesar 25,37%, belanja barang non operasional sebesar 56,83%, belanja jasa 24,58, belanja pemeliharaan sebesar 30,06%, belanja perjalanan dalam negeri sebesar 88,61%.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Rp0,- adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Belanja modal
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Dikarenakan tidak terdapat pagu belanja modal pada tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Realisasi Belanja modal Balai KIPM Semarang tidak mengalami kenaikan atau penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2024.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0,-*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin			-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
		(Unit)	(Rp)
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-*

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi 31 Desember 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Des 2025	REALISASI 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung & Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Perjalanan Gedung & Bangunan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	
Jumlah Belanja	-	-	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada penambahan pada belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk laporan yang berakhir 31 Desember 2025

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya untuk laporan yang berakhir 31 Desember 2025.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0,00 Tidak terdapat belanja bantuan sosial di Balai KIPM Semarang.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024*

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
BP Kas	-	-
BP Uang Muka/Voucher	-	-
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Pendapatan Jasa yang berasal dari pendapatan jasa karantina perikanan.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024*

Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP yang ada direkening Bendahara maupun uang tunai di berangkas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024*

Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Kas lainnya dan setara kas pada 31 Desember 2025 senilai Rp0,-

C.4 Piutang PNB

*Piutang PNB
Rp0,00*

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama	31 Des 2025	31 Des 2024
	-	-	-
	Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp67.454,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.67.454,- dan Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah **piutang** yang berasal dari penerimaan negara **bukan pajak** yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan, penyisihan piutang tidak tertagih (Rp. 338,-) dari 5 permil dikurangi (–) Piutang

Bukan Pajak Rp. 67.792,- sehingga didapatkan sebesar Rp. 67.454,- adapun tabel rincian sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Nama Perkiraan	tahun 2025	tahun 2024	Kenaikan (penurunan)
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	67.792	0	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
Piutang Bukan Pajak	338	0	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	67.454	0	-

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	67.454	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	67.454		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	67.454		-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0,00*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut

*Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024*

Jenis	31 Des 2025	31 Des 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis	31 Des 2025	31 Des 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp260.159.499,-*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp260.159.499,- dan Rp269.951.154,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Des 2025	31 Des 2024
Barang Konsumsi	50.671.383	21.088.741
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	21.390.895
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan Baku	209.488.116	227.471.518
Jumlah	260.159.499	269.951.154

Transfer Masuk dan keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp85.678.020,- terdiri dari:

Akun	Uraian	Nilai Transfer Masuk	Nilai Transfer Keluar	Selisih
117111	Barang Konsumsi	85.678.020	732.400	84.945.620
117121	Bahan Baku	45.179.940	-	45.179.940
TOTAL		130.857.960	732.400	130.125.560

U R A I A N	K U A N T I T A S	R U P I A H
Barang Konsumsi		
Barang Cetakan	8,745	85,678,020
Sertifikat HC Mutu Kode A	100	665,000
Sertifikat HC Mutu Kode D	100	665,000
Sertifikat HC Mutu Kode E	150	997,500
Sertifikat HC Mutu Kode B	300	3,990,000
Sertifikat HC Mutu Kode F	100	665,000
Sertifikat HC Mutu Kode G	50	332,500
Sertifikat HC Mutu Kode XF	50	363,000
SMKHP Kode H	1,400	10,270,800
SMKHP Kode A	350	2,544,700
SMKHP Kode B	2,800	40,863,925
SMKHP Kode D	650	4,726,000
SMKHP Kode E	950	6,907,200
SMKHP Kode F	750	5,452,950
SMKHP Kode G	600	4,362,400
SMKHP Kode XA	145	1,054,295
SMKHP Kode XF	250	1,817,750
Jumlah	8,745	85,678,020

117131	Bahan Baku		
1010102001	Bahan Kimia Padat	11	39,689,940
000025	Brilliant green lactose broth	1	3,810,000
000068	Lactose Broth	1	2,470,000
000070	Lysine Iron Agar	1	4,398,000
000073	Rappaport vassiliadis salmonella	1	1,784,940
000077	Triple sugar iron agar	1	2,993,000
000079	XLD	1	3,070,000
000081	EC Broth	1	3,993,000
000096	Lauryl sulfate broth	1	1,910,000
000108	MKTTn Broth base	1	4,859,000
000122	Napthol	1	7,492,000
000158	Plate Count Agar	1	2,910,000
1010102999	Bahan Kimia Lainnya	1	5,490,000
000020	Formaldehyde Test Kit	1	5,490,000
	Jumlah	12	45,179,940
	Total Jumlah	8,757	130,857,960

Penjelasan rinci atas transaksi transfer masuk diatas adalah sebagai berikut :

1. BAST No. 16/ BPPMHKP.1/PL.520/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.325.000,-.
2. BAST No. 142/BUSKIPM/PL.520/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 adalah penerimaan Bahan Laboratorium dari BUSKIPM senilai Rp.45.179.940,-.
3. BAST No. 81/ BPPMHKP.1/PL.520/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.4.795.000,-.
4. BAST No. 1118/ BPPMHKP.1/PL.520/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.5.830.000,-.
5. BAST No. 1335/BPPMHKP.1/PL.520/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.968.000,-.
6. BAST No. 1603/ BPPMHKP.1/PL.520/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.639.200,-.
7. BAST No. 2080/ BPPMHKP.1/PL.520/IV/2025 tanggal 30 April 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.14.232.500,-.

8. BAST No. 2625/ BPPMHKP.1/PL.520/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.271.750,-.
9. BAST No. 2891/ BPPMHKP.1/PL.520/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.639.625,-.
10. BAST No. 3358/BPPMHKP.1/PL.520/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.9.446.195,-.
11. BAST No. 4312/ BPPMHKP.1/PL.520/IX/2025 tanggal 15 September 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.649.250,-.
12. BAST No. 4733/ BPPMHKP.1/PL.520/X/2025 tanggal 09 Oktober 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.3.640.400,-.
13. BAST No. 4951/ BPPMHKP.1/PL.520/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.4.738.400,-.
14. BAST No. 5328/ BPPMHKP.1/PL.520/XI/2025 tanggal 18 November 2025 adalah penerimaan Sertifikat kesehatan dari Sekretariat BPPMHKP senilai Rp.21.502.700,-.

NOMOR BAST	Tanggal			asal	jumlah
BAST No. 16/ BPPMHKP.1/PL.5 20/I/2025	6	Januari	2025	Sekret ariat	Rp 3.325.000
BAST No. 142/BUSKIPM/PL. 520/II/2025	18	Februari	2025	BUSKI PM	Rp 45.179.940
3. BAST No. 81/ BPPMHKP.1/PL.520/I I/2025	5	Februari	2025	Sekret ariat	Rp 4.795.000
1118/ BPPMHKP.1/PL.5 20/II/2025	20	Februari	2025	Sekret ariat	Rp 5.830.000
1335/BPPMHKP.1 /PL.520/III/2025	5	Maret	2025	Sekret ariat	Rp 3.968.000
1603/ BPPMHKP.1/PL.5 20/III/2025	20	Maret	2025	Sekret ariat	Rp 3.639.200

2080/ BPPMHKP.1/PL.5 20/IV/2025	30	april	2025	Sekretariat	Rp 14.232.500
2625/ BPPMHKP.1/PL.5 20/VI/2025	11	Juni	2025	Sekretariat	Rp 3.271.750
2891/ BPPMHKP.1/PL.5 20/VI/2025	30	Juni	2025	Sekretariat	Rp 3.639.625
3358/BPPMHKP.1 /PL.520/VII/2025	28	Juli	2025	Sekretariat	Rp 9.446.195
4312/ BPPMHKP.1/PL.5 20/IX/2025	15	September	2025	Sekretariat	Rp 3.649.250
4733/ BPPMHKP.1/PL.5 20/X/2025	8	Oktober	2025	Sekretariat	Rp 3.640.400
4951/ BPPMHKP.1/PL.5 20/X/2025	27	Oktober	2025	Sekretariat	Rp 4.738.400
5328/ BPPMHKP.1/PL.5 20/XI/2025	18	Nov-25	2025	Sekretariat	Rp 21.502.700
TOTAL					Rp 130.857.960

Penjelasan rinci atas transaksi transfer masuk diatas adalah sebagai berikut:

Barang Konsumsi		
Barang Cetak	-75	-732,400
SMKHP Kode H	-50	-367,500
SMKHP Kode B	-25	-364,900
Jumlah	-75	-732,400
Total Jumlah	-75	-732,400

1. BAST No. 441/ BKIPM.SMG/PL.520/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 adalah pengiriman Sertifikat kesehatan dari BKIPM Semarang ke BKIPM Bali senilai Rp.732.400,-.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2025 dan 31 Desember

No	Debitur	31 Des 2025	31 Des 2024
	-	-	-
2024	Jumlah	-	-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Debitur	31 Des 2025	31 Des 2024
	-	-	-
	Jumlah	-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Tanah

*Tanah
Rp6.270.680.361,-*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.6.270.680.361,- dan Rp 6.270.680.361,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2024	6.270.680.361
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Hibah	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Des 2025	6.270.680.361

Tidak terdapat mutasi selama periode pelaporan sampai dengan 31 Desember 2025 seluas 1.204 m2.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1528 m2	JL. Dr. Soeratmo rt 01 rw 08 semarang	6.270.680.361
Jumlah			6.270.680.361

Tanah seluas 1.528 m2 yang terletak di Jalan Dr.Soeratmo Semarang pada tanggal pelaporan tidak dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp10.183.888.182,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.837.306.411,- dan Rp.10.183.888.182,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10.183.888.182
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang/ transfer keluar	-
Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerir	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	10.183.888.182
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	-9.346.581.771
Nilai Buku per 31 Desember 2025	837.306.411

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai KIPM Semarang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.386.967.560,- .Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 31 Desember 2024 Audited sebesar Rp. 10.183.888.182,- terdapat Mutasi tambah selama periode TA. 2024 senilai Rp.97.918.000,- yang terdiri dari pembelian senilai Rp.0,- dan transfer masuk senilai Rp.97.918.000,- ,koreksi bertambah senilai Rp.0,- dan mutasi berkurang senilai Rp.3.146.262.538,- yang terdiri dari transfer keluar senilai Rp.3.146.262.538,- dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp.0,-.

Rincian pembelian Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi aset sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
		(Unit)	(Rp)
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp8.269.719.162,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.269.719.162,- dan Rp11.806.567.872,- . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10.097.540.816
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan bangunan dan gedung	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Akibat Koreksi	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari Penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	10.097.540.816
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.827.821.654)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.269.719.162

Rincian Nilai Aset Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Gedung dan Bangunan	Rp 11.806.567.872	Rp 11.806.567.872
	Jumlah	Rp 11.806.567.872	Rp 11.806.567.872
	Akumulasi Penyusutan	Rp (1.827.821.654)	Rp (1.709.027.056)
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp 9.978.746.218	Rp 10.097.540.816

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp14.790.000,-*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.790.000,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.790.000
Mutasi tambah:	
Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Des 2024	14.790.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	(7.210.125)
Nilai Buku per 31 Des 2024	7.579.875

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Uraian		Kuantitas	Nilai	Akum Peny	Nilai Buku
A	Jalan				
-	Jalan & Jembatan	0	-	-	-
B	Irigasi				
-	Bangunan Air	0	-	-	-
C	Jaringan				
-	Instalasi Air	3	14.790.000	7.025.250	7.764.750
Total			14.790.000	7.025.250	7.764.750

Rincian Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 14.790.000	Rp 32.847.675
Jumlah		Rp 14.790.000	Rp 32.847.675
Akumulasi Penyusutan		Rp (7.025.250)	Rp (15.634.335)
Nilai Netto/ Nilai Buku		Rp 7.764.750	Rp 17.213.340

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp700.000,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Aset tetap lainnya sebanyak 2 unit berupa kartografi dengan nilai sebesar Rp0. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp.700.000,- sampai dengan periode 31 Desember 2025. Aset Tetap Lainnya tersebut tidak berstatus sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau tidak sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan dan juga tidak terdapat Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Aset Tetap Lainnya tersebut masih dalam kondisi baik namun dilakukan reklasifikasi masuk ke peralatan dan mesin dan disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	700.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	700.000
Saldo per 31 Des 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024	-
Nilai Buku per 31 Des 2025	0

Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp 700.000
	Jumlah	Rp -	Rp 700.000
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp -	Rp 700.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,-

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Saldo Per 1 Januari 2025	Rp	-
Mutasi Tambah :		
	Rp	-
Jumlah Penambahan	Rp	-
Mutasi Kurang :		
- Nihil	Rp	-
Jumlah Pengurangan	Rp	-
Saldo Per 31 Des 2025	Rp	-
nilai Buku Per 31 Des 2025	Rp	-
Nilai Buku Per 31 Des 2025	Rp	-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp11.458.611.174,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp11.458.611.174,- dan Rp10.864.495.091,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6.270.680.361	-	6.270.680.361
2	Peralatan dan Mesin	10.184.588.182	9.504.599.922	679.988.260
3	Gedung dan Bangunan	11.806.567.872	1.946.616.252	9.859.951.620
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.790.000	7.395.000	7.395.000
5	Aset Tetap Lainnya	0		0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0		0
Jumlah		28.276.626.415	11.458.611.174	16.818.015.241

C.21 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Des 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Des 2025	-
Nilai Buku per 31 Des 2025	-

Rincian Nilai Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
1	Software	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -
	Nilai Netto/ Nilai Buku	Rp -	Rp -

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,- dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional entitas.

Adapun aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Des 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Des 2025	-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	-
Aset Lain-Lain	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesarRp.0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp72.012.049,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.72.012.049,- dan Rp.23.787.428,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Belanja Langganan Listrik	18.641.607
Belanja Langganan Telepon	286.588
RPATA Jasa Keamanan	26.599.000
RPATA Jasa Kebersihan	17.568.788
RPATA Jasa Supir	4.392.200
RPATA Internet	3.232.050
Kekurangan Gaji	1.291.816
Jumlah	72.012.049

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Dibayar Dimuka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,00*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
-	-	-
Jumlah	-	-

C.28 Ekuitas

*Ekuitas
Rp17.058.022.183*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17.058.022.183,- dan Rp.17.658.295.050,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp1.002.209.000

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.006.175.000,- dan Rp2.006.175.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.002.209.000	2.006.175.000	(50,04)
Jumlah	1.002.209.000	2.006.175.000	(50,04)

Pendapatan Jasa yang diperoleh dari pendapatan pengujian sertifikasi kalibrasi dan Standardisasi lainnya (425289) Sebesar Rp.1.002.209.000,- yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang yang telah disetor ke negara sebesar Rp.1.002.209.000,-.

Beban Pegawai
Rp4.832.334.024,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.832.334.024,- dan Rp3.777.699.027,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.642.328.760	1.388.710.400	18,26
Beban Perbulatan Gaji PNS	23.226	19.745	17,63
Beban Tunj suami istri	109.985.864	88.281.960	24,58
Beban Tunjangan anak	36.703.590	31.662.412	15,92
Beban Tunj Struktural	13.500.000	17.280.000	-21,88
Beban Tunj Fungsional	101.820.000	124.010.000	-17,89
Beban Tunj Pph PNS	13.503.877	10.425.461	29,53
Beban Tunj Beras	86.252.220	74.520.180	15,74
Beban Uang Makan	257.785.000	182.130.000	41,54
Beban Tunj Umum	45.720.000	16.625.000	175,01
Beban Uang Lembur	68.791.000	36.338.000	89,31
Beban Pegawai(tunj khusus)	2.267.734.267	1.807.695.869	25,45
Jumlah	4.644.147.804	3.777.699.027	22,94

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, realisasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 22,94 dikarenakan terdapat mutasi masuk pegawai 5 pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp156.134.614,-

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp156.134.614,- dan Rp295.827.809,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024*

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	83.648.511	102.560.223	-18,45
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	72.486.103	193.267.586	-62,50
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah	156.134.614	295.827.809	-47,23

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2.350.092.102,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.688.833.130,- dan Rp2.350.092.102,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan dalam mendukung tupoksi pelayanan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	462.577.945	728.831.764	(36,53)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.483.200	18.191.805	(9,39)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.151.974	1.485.645	44,86
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.984.000	75.636.000	38,80
Beban Barang Operasional Lainnya	76.589.484	62.468.722	22,60
Beban barang operasional -penanganan pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Beban Bahan	46.506.147	223.035.188	(79,16)
Beban Honor Output Kegiatan	1.360.000	4.888.000	(72,18)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	55.600.000	11.725.000	374,20
Beban barang non operasional - penanganan pandemi Covid			#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	201.822.258	320.316.504	(36,99)
Beban Langganan Telepon	2.847.741	3.401.634	(16,28)
Beban Langganan Air	-	7.628.400	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro	-		#DIV/0!
Beban Sewa	-	15.000.000	(99,99)
Beban Jasa Profesi	1.800.000	17.900.000	(89,93)
Belanja Jasa Lainnya	716.110.381	859.583.440	(16,68)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin	-		#DIV/0!
Jumlah	1.688.833.130	2.350.092.102	(28,14)

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, realisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 28.14%. Penurunan ini disebabkan antara lain penurunan pagu anggaran pada TA 2025.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp492.547.832,-*

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp492.547.832,- dan Rp619.028.814,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban

pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.310.888	278.286.230	(28,39)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229.121.020	321.261.964	(28,69)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	57.408.664	8.397.750	583,62
Beban Persediaan Suku Cadang	6.807.260	11.082.870	(38,57)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	492.647.832	619.028.814	487,97

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp601.561.818,-

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.661.238,- dan Rp601.561.818,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	57.408.664	438.266.243	-86,90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000	56.550.000	-92,22
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	960.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.852.574	105.785.575	-93,52
Jumlah	68.661.238	601.561.818	-88,59

Jika dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024, realisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 88,59%. Dikarenakan pagu anggaran pada 2025 mengalami penurunan jika dibanding pagu anggaran TA 2024 sebagai dampak dari blokir pagu anggaran atas arahan dari Presiden.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Balai KIPM Semarang:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat bantuan sosial pada Balai KIPM Semarang

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	% NAIK (TURUN)
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp758.173.172,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing

sebesar Rp758.173.172,- dan Rp1.032.061.427,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	495.437.418	495.437.418	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	262.068.376	262.068.376	-
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	667.378	667.378	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan d	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	758.173.172	758.173.172	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	758.173.172	758.173.172	-

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp338,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,338- dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	388	-	-
Jumlah	388	-	-

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp-45.304.861,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024**

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Jumlah Beban dari Kegiatan non oprasional lainnya	45.304.861	31.116.587	45,60
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	657.813	(100,00)
Jumlah surplus defisit pelepasan aset non lancar	0	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-45.304.861	-30.458.774	48,75

*)Pendapatan/ BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp17.658.295,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.658.295,- dan Rp25.712.361.532,-.

Defisit LO

Rp-

6.834.689.407,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp-6.834.689.407,- dan Rp-6.443.211.329,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp. 0,00,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Penambahan Saldo Awal	-
Jumlah	-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp-0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp
10.358.837,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.10.358.837,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	10.358.837
Jumlah	10.358.837

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Lain-lain	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp-
6.224.057.703,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-6.224.057.703,- dan Rp-1.610.855.153,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	1.002.209.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(7.096.141.143)
Transfer Masuk	(130.857.960)
Transfer Keluar	732.400
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(6.224.057.703)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp1.002.209.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp-7.096.141.143,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp85.678.020,- terdiri dari:

U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
Barang Konsumsi		
Barang Cetakan	8,745	85,678,020
Sertifikat HC Mutu Kode A	100	665,000
Sertifikat HC Mutu Kode D	100	665,000
Sertifikat HC Mutu Kode E	150	997,500
Sertifikat HC Mutu Kode B	300	3,990,000
Sertifikat HC Mutu Kode F	100	665,000
Sertifikat HC Mutu Kode G	50	332,500
Sertifikat HC Mutu Kode XF	50	363,000
SMKHP Kode H	1,400	10,270,800
SMKHP Kode A	350	2,544,700
SMKHP Kode B	2,800	40,863,925
SMKHP Kode D	650	4,726,000
SMKHP Kode E	950	6,907,200
SMKHP Kode F	750	5,452,950
SMKHP Kode G	600	4,362,400
SMKHP Kode XA	145	1,054,295
SMKHP Kode XF	250	1,817,750
Jumlah	8,745	85,678,020

117131	Bahan Baku		
1010102001	Bahan Kimia Padat	11	39,689,940
000025	Brilliant green lactose broth	1	3,810,000
000068	Lactose Broth	1	2,470,000
000070	Lysine Iron Agar	1	4,398,000
000073	Rappaport vassiliadis salmonella	1	1,784,940
000077	Triple sugar iron agar	1	2,993,000
000079	XLD	1	3,070,000
000081	EC Broth	1	3,993,000
000096	Lauryl sulfate broth	1	1,910,000
000108	MKTTn Broth base	1	4,859,000
000122	Napthol	1	7,492,000
000158	Plate Count Agar	1	2,910,000
1010102999	Bahan Kimia Lainnya	1	5,490,000
000020	Formaldehyde Test Kit	1	5,490,000
	Jumlah	12	45,179,940
	Total Jumlah	8,757	130,857,960

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp732.400,-.

Barang Konsumsi		
Barang Cetak	-75	-732,400
SMKHP Kode H	-50	-367,500
SMKHP Kode B	-25	-364,900
Jumlah	-75	-732,400
Total Jumlah	-75	-732,400

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk laporan yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
Total Pengesahan			-
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp17.058.022.183,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.058.022.183,- dan Rp17.658.295.050,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

A.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Balai KIPM Semarang

A.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Terdapat Akrua atau tagihan Bulan Desember 2025 yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran 2025 berakhir antara lain Tagihan Listrik sebesar Rp. 18.641.607,- dan Tagihan Telepon sebesar Rp.286.588, pengembalian tukin, 67.792, RPATA Keamanan Kantor 26.599.000, RPATA Kebersihan kantor 17.568.788,-, RPATA Pengemudi Kantor Rp. 4.392.200,- RPATA Internet Rp. 3.232.050,-, kekurangan gaji Rp. 1.146.600,-, kekurangan gaji Rp. 820.089,- dan Rp 428.100,-.
- Penjelasan rinci atas transaksi transfer masuk diatas adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Des 2025
RPATA Jasa Keamanan Kantor	26.599.000
RPATA Jasa Kebersihan kantor	17.568.788
RPATA Supir	4.392.200
RPATA internet	3.232.050
Listrik	18.641.607
Telpon	286.588
Kekurangan gaji	1.291.816
Jumlah	72.012.049

1. Pembayaran Pengadaan 1 (Satu) Paket Jasa Keamanan Kantor Balai KIPM Semarang sesuai BAST Nomor058/BKIPM.SMG/PPK/BAST/PL.450/XII/2025
Tanggal 31-12-2025 (Untuk 6 Orang)
Nilai : 26.599.000
No SP2D : 261340000000160
Tanggal SP2D: 6 Januari 2026
2. Pembayaran Pengadaan 1 (Satu) Paket Jasa Kebersihan Kantor Balai KIPM Semarang sesuai BAST Nomor057/BKIPM.SMG/PPK/BAST/PL.450/XII/2025
Tanggal 31-12-2025 (Untuk 4 Orang)
Nilai : 17.568.788
No SP2D : 261340000000161
Tanggal SP2D: 6 Januari 2026

3. Pembayaran Pengadaan 1 (satu) Paket Jasa Pengemudi Kantor Balai KIPM Semarang sesuai BAST Nomor059/BKIPM.SMG/PPK/BAST/PL.450/XII/2025

Tanggal 31-12-2025 (Untuk 1 Orang)

Nilai : 4.392.200

No SP2D : 261340000000162

Tanggal SP2D: 6 Januari 2026

4. Pembayaran Pengadaan 1 (satu) Paket Jasa Layanan Internet Kantor Balai KIPM Semarang sesuai BAST Nomor060/BKIPM.SMG/PPK/BAST/PL.450/XII/2025

Tanggal 31-12-2025

Nilai : 3.232.050

No SP2D : 261340000000163

Tanggal SP2D: 6 Januari 2026

5. Pembayaran belanja barang berupa tagihan listrik bulan Desember 2025

Tanggal 31-12-2025

Nilai : 18.641.607

No SP2D : 261340000000420

Tanggal SP2D: 2026-01-15

6. Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Desember 2025

Tanggal 31-12-2025

Nilai : 18.641.607

No SP2D : 261340000000420

Tanggal SP2D: 2026-01-15

7. Pembayaran belanja kekurangan gaji bulan Oktober-November 2025

Tanggal 31-12-2025

Nilai : 820.089

No SP2D : 261340000000956

Tanggal SP2D: 2026-01-15

8. Pembayaran belanja kekurangan gaji bulan Oktober-November 2025

Tanggal 31-12-2025

Nilai : 428.100

No SP2D : 261340000000957

Tanggal SP2D: 2026-01-15

- Terdapat anggaran Prioritas Nasional dalam Pagu anggaran TA 2025 antara lain:

NO	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi dilaboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	49.280.000	49.249.284	99,94
2	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu	25.000.000	24.995.518	99,98
3	Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	30.040.000	29.839.600	99,33
4	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0
5	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	72.880.000	43.471.454	59,65
6	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	81.220.000	8.264.644	10,18
7	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	25.000.000	0	0
8	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20.000.000	496.900	2,48

DOKUMEN PENDUKUNG

E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN		
1. CaLK sampai saat direviu masih dalam proses penyusunan, terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK, antara lain: a. Transfer masuk dan transfer keluar; b. Rincian RPATA; c. Kewajiban berupa utang kepada pihak ketiga; d. Pengungkapan outpun PN yang sesuai dengan monitoring kinerja di monsakti. 2. CaLBMN sampai saat direviu masih dalam proses penyusunan, terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLBMN, antara lain transfer keluar persediaan.		
Usulan Koreksi		
1. Koreksi pada LO, LPE, dan Neraca; dan 2. Perbaiki CaLK dan CaLBMN sebagaimana pada butir E.		
Tindak Lanjut		
Satker telah melaksanakan tindak lanjut berupa koreksi pada LO, LPE, dan Neraca		
Koreksi yang Belum Ditindak Lanjuti		
Perbaiki CaLK dan CaLBMN sebagaimana pada butir E.		
		Bandung, 15 Januari 2026
Tim Reviu,  Devita D. S.	Operator Keuangan,  Mochammad Zainil Achyar	Operator BMN  Yudha Kiswanto